

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan TPS 3R Di Kecamatan Klambu

Agus Sarwo Edy Sudrajat¹, Ricky Bagus Santoso¹, Hendrianto Sundaro¹

¹Universitas Semarang; Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari, Semarang;
email : agus.sarwo16@gmail.com

ABSTRAK

Program TPS 3R yaitu kegiatan pengurangan dan penanganan sampah agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat itu sendiri untuk melaksanakan pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Dalam pengelolaan tersebut perlu adanya peran masyarakat, Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pengelolaan persampahan. Keterlibatan masyarakat dapat diukur melalui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat. Bentuk Partisipasi dan tingkat masyarakat. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data berdasarkan jumlah atau banyaknya yang dilakukan secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Kemudian untuk memperoleh data, pada penelitian ini untuk pengambilan data menggunakan kuesioner yang akan diisi oleh pengelola dan masyarakat terlayani TPS 3R. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan TPS 3R Belik Sari Kecamatan Klambu. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah mengetahui Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Perencanaan TPS 3R Belik Sari Kecamatan Klambu.

Kata Kunci : Tingkat, Partisipasi, Perencanaan

ABSTRACT

The 3R TPS program is an activity to reduce and manage waste so that all levels of society, both the government, the business world and the community themselves, can implement restrictions on waste generation, recycling, and reuse of waste or better known as 3R (Reduce, Reuse, Recycle). The management needs the role of the community. Community participation is one of the supporting factors for the success of solid waste management. Community involvement can be measured through the form and level of community participation. Participation form and community level. The research method in this study uses quantitative analysis, namely the activities of collecting, processing, analyzing, and presenting data based on the amount or number that is carried out objectively to solve a problem or test a hypothesis to develop general principles. Then to obtain data, in this study to collect data using a questionnaire that will be filled out by the manager and the community served by TPS 3R. The main objective of this study is to identify the level of community participation in the planning of the Belik Sari 3R TPS, Klambu District. While the expected result is to know the level of community participation in the planning stages of TPS 3R Belik Sari, Klambu District.

Keyword: Level, Participation, Planning

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah rumah tangga di Kabupaten Grobogan perlu untuk segera diatasi. Permasalahan sampah harus diatasi dengan pengelolaan sampah dengan cara yang baik dan benar, serta harus sesuai dengan peraturan yang ada serta yang mampu memberikan keuntungan bagi lingkungan dan masyarakat. Berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2008 dan PP RI Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Sesuai dengan tren global, sistem pengelolaan sampah berorientasi pada isu keberlanjutan, terutama melalui penggabungan teknologi 3R (Shekdar, 2009).

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang cepat akan secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan produksi sampah. Sistem pengelolaan sampah yang tidak efektif dan efisien akan berdampak pada akumulasi limbah di lokasi pemrosesan akhir (Harjanti dan Anggraini, 2020; Jayantri dan Ridlo 2022). Pemerintah Kabupaten Gobogan terus berupaya dalam melakukan pembenahan dan penanganan sampah, bukan hanya dilakukan diperkotaan melainkan juga dipedesaan. Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam melakukan penanganan permasalahan sampah rumah tangga yaitu melalui sarana Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce dan Recycle (TPS 3R). Pengelolaan sampah rumah tangga tentu harus dilakukan oleh beberapa pihak, bukan hanya pemerintah saja, melainkan masyarakat sebagai penghasil sampah itu sendiri sangat perlu ikut berpartisipasi. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan melalui pengurangan sampah untuk menghindari kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh adanya penumpukan sampah di lingkungan.

Desa Klambu merupakan salah satu dari 8 Desa yang menjalankan TPS 3R sebagaimana mestinya. TPS 3R di Desa Klambu bernama TPS 3R Belik Sari yang dibangun di lahan tanah seluas 200 m². TPS 3R Belik Sari Desa Klambu didirikan pada tahun 2016 oleh Sarket PLP Jawa Tengah dengan jangkauan pelayanan sebanyak 175 KK. Jumlah sampah yang masuk di TPS 3R Belik Sari sebanyak 1440 kg/hari, dengan rincian 100 kg sampah berbahan dasar

plastik, 115 kg sampah berbahan dasar kertas, dan 4 kg berbahan dasar logam. Untuk jumlah sampah yang akan di kompos sebanyak 216 kg/hari, kemudian sampah residu yang di buang ke TPA sebanyak 1003 kg/hari. Berjalannya TPS 3R di Desa ini dikarenakan adanya beberapa penyebab yaitu adanya penyuluhan/sosialisasi/pelatihan tentang pengelolaan sampah, selain itu terdapat pula SDM yang mampu mengoperasikan mesin pencacah sampah organik dan anorganik yang diberikan sebagai bantuan dari Provinsi Jawa Tengah yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, selain itu terdapat KSM yang bersedia dalam pengelolaan TPS 3R di Desa Klambu.

Dalam pengelolaan tersebut peran masyarakat juga sangat diperlukan, bukan hanya KSM yang menjadi pengelola utama TPS 3R tersebut. Berdasarkan penuturan pengelola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TPS 3R mengalami penurunan setiap tahunnya., disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik. Karena partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan ini, apakah masyarakat sudah dilibatkan mulai dari perencanaan dan pembangunan TPS 3R. Sebagai perbandingan, pada pembangunan TPS 3R baru yang berada di Kecamatan Kuwaron, masyarakat juga ikut berperan dalam pembangunan tersebut, ada masyarakat yang di tunjuk sebagai pegawai dan ada juga masyarakat yang ikut membantu berdasarkan kesadaran masyarakat itu sendiri. Dikarenakan masyarakat sadar pentingnya akan pengelolaan sampah dengan prinsip TPS 3R.

Melihat keaktifan masyarakat dalam keterlibatan perencanaan dan pembangunan TPS 3R di Kecamatan Kuwaron. Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut melalui penelitian mengenai Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pembangunan TPS 3R Di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Karena TPS 3R Kecamatan Klambu didirikan pada tahun 2016 dan sampe sekarang berdasarkan penuturan pengelola partisspasi masyarakat setiap tahunnya mengalami penurunan. Sehingga diharapkan dapat di ketahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan TPS 3R di Kecamatan Klmbu. Sehingga, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan TPS 3R pada tahapan perencanaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TPS 3R

Terdapat tiga prinsip yang diterapkan dalam pengolahan sampah yang disebut sebagai “Prinsip 3R” yaitu :

1. *Reduce* (mengurangi), Upaya sedapat mungkin mengurangi pembentukan sampah sejak dari sumbernya. Pengurangan dilakukan tidak terbatas pada kuantitasnya saja, tetapi juga mencegah pemakaian barang atau bahan berbahaya atau tidak mudah terurai secara biologis.

2. *Reuse* (menggunakan kembali), Memilih atau menyortir barang atau bahan yang bisa dipakai kembali. Menghindari pemakaian barang atau bahan sekali pakai (*disposable*), sekaligus memperpanjang pemakaian barang melalui perawatan dan pemanfaatan ulang. Pada prinsipnya, diusahakan agar barang atau bahan bisa dipakai berulang-ulang sampai benar-benar tidak bisa digunakan lagi.

3. *Recycle* (mendaur ulang), Barang atau bahan yang sudah tidak berguna didaur ulang dan diolah menjadi produk lain yang bermanfaat dan punya nilai ekonomi. Pada umumnya upaya ini membutuhkan peran serta produsen dari sektor industri untuk mengolah sampah menjadi produk baru dalam skala besar. Terdapat beberapa jenis sampah yang dapat didaur ulang sendiri oleh masyarakat, salah satu diantaranya adalah sampah organik yang dapat diubah menjadi arang briket dan kompos.

2.2. PERENCANAAN

Tahap ini meliputi kegiatan :

- a. Penyiapan masyarakat pada lokasi terpilih dan pembentukan KSM melalui musyawarah mufakat, yang menetapkan bentuk dan susunan pengurus melalui Surat Keputusan (SK) Pemerintah Kabupaten/Kota. Fokus penanganan sampah di kawasan permukiman kumuh dan kawasan masyarakat berpenghasilan rendah, juga harus merupakan prioritas, karena umumnya sangat mendesak untuk penanganan sampah skala komunal.
- b. Penetapan lokasi TPS 3R melalui surat penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Satker PSPLP Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Direktur PPLP, yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah
- c. Penetapan lokasi TPS 3R melalui surat penetapan lokasi yang ditandatangani oleh Satker PSPLP Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Direktur PPLP, yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten/Kota, mencantumkan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan (OP) TPS 3R
- d. Penyusunan RKM yang dilakukan oleh KSM dan didampingi oleh fasilitator dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah (Dinas/SKPD terkait). Pembuatan Rencana Teknik

Rinci (RTR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) konstruksi serta RAB OP dilakukan oleh KSM dengan didampingi oleh fasilitator dan Dinas/SKPD terkait.

2.3. TINGKAT PARTISIPASI

Menurut pernyataan Sherry R Arnstein yang dikutip oleh Sigit, bahwa membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Tingkat partisipasi dari tertinggi sampai terendah adalah sebagai berikut :

- a. *Citizen control*, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat memiliki wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana tanpa melalui pihak ketiga.
- b. *Delegated power*, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat dan tidak ada tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.
- c. *Partnership*, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.
- d. *Placation*, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, dimana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.
- e. *Consultation*, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan

- adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan public hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat.
- f. *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagi pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan atau negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.
 - g. *Therapy*, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.
 - h. *Manipulation*, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

3. DATA DAN METODE

3.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian survei, data merupakan hal utama yang akan diproses dan dianalisis. Ada dua teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner dan observasi. Kuesioner adalah sebuah teknik menghimpun data dari sejumlah orang atau responden melalui seperangkat pertanyaan untuk dijawab. Dengan memberikan daftar pertanyaan tersebut, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian dikumpulkan sebagai data. Nantinya, data diolah dan disimpulkan menjadi hasil penelitian. Pada dasarnya, tujuan dan manfaat kuesioner adalah untuk mendapatkan sejumlah data atau informasi yang relevan dengan topik penelitian. Umumnya, Metode ini lebih banyak digunakan pada penelitian kuantitatif guna menguraikan hubungan antara variabel. Dalam penelitian ini tahapan penyebaran kuesioner diawali dengan membagikan kuesioner ke pengelola dan masyarakat terlayani dimana pada saat melakukan penyebaran kuesioner, peneliti juga melakukan sedikit wawancara mengenai cara pengisian kuesioner tersebut, agar hasil yang diharapkan sesuai yang diinginkan peneliti dan tidak terjadi kesalahan dalam pengisian kuesioner tersebut.

Teknik lain yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu observasi. Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian yang dilakukan. Seperti halnya menyebarkan kuesioner, mengambil hasil kuesioner, mengambil dokumentasi lapangan, dan mencari informasi pada pengelola TPS 3R. Observasi ini dilakukan di TPS 3R Kecamatan Klambu.

3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi untuk dijadikan dasar sebagai perancangan menentukan responden dalam menyusun kuesioner. Dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sebagai dasar dalam menentukan jumlah responden. Berikut adalah perhitungan rumus slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Secara matematis rumus slovin ditulis dengan $n = N / \{1 + ((N) \times (e^2))\}$. Dalam rumus tersebut, terlihat unsur-unsur rumus seperti n , N , dan e . Berikut adalah penjelasannya :

- n adalah jumlah sampel yang dicari
- N adalah jumlah populasi
- e adalah margin eror yang ditoleransi.

Berdasarkan penuturan ketua KSM total masyarakat yang terlayani paling banyak 175 Kepala keluarga, dimana dalam satu KK diindikasikan terdapat 4 responden. Dimana total masyarakat yang terlayani sebanyak 700 orang Untuk perhingan sampelnya sebagai berikut :

$$n = \frac{700}{1 + ((700) \times (0,1^2))}$$

$n = 87,5$ responden

3.3 Metode Analisis

Pada analisis penelitian tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan TPS 3R di Kecamatan Klambu menggunakan analisis skoring dan pembobotan untuk mengukur pada tingkatan mana partisipasi masyarakat dalam tangga partisipasi *Arnstein*.

Sebelum di tentukan peringkat dan klasifikasinya maka dapat ditentukan perhitungan interval terlebih dahulu untuk mengetahui jarak antar kelas, untuk dapat ditentukan

peringkatnya (Risnita, 2012). Berikut merupakan perhitungan untuk menciptakan kelas interval (Sugiyono, 2014).

$$Interval = \frac{\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal}}{\text{Banyaknya Klasifikasi}}$$

Perhitungan skoring berdasarkan masyarakat terlayani sebagai berikut. Dari setiap individu akan dihasilkan skor minimum 1, yaitu 1 x 1 dan skor maksimum 8, yaitu 1 x 8. Apabila jumlah responden 87 orang, maka skor minimum untuk tingkat partisipasi masyarakat (87 x 1) adalah 87 dan skor maksimum dari tingkat partisipasi pengelola (87 x 8) adalah 696. Maka jarak intervalnya (696-8)/8 adalah 86. Untuk skor tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Tabel Skoring Tangga Partisipasi Masyarakat Terlayani

| Bobot | Tingkat Partisipasi | Jumlah Skor |
|-------|------------------------|-------------|
| 8 | <i>Citizen Control</i> | 610 - 696 |
| 7 | <i>Delegated Power</i> | 523 - 609 |
| 6 | <i>Partnership</i> | 436 - 522 |
| 5 | <i>Placation</i> | 349 - 435 |
| 4 | <i>Consultation</i> | 262 - 348 |
| 3 | <i>Informing</i> | 175 - 261 |
| 2 | <i>Therapy</i> | 88 - 174 |
| 1 | <i>Manipulation</i> | 0 - 87 |

Sumber : Olah Data Peneliti 2022

Tingkat partisipasi masyarakat di ukur menggunakan tahapan perencanaan dan tahapan pembangunan. Masing-masing indikator di hubungkan dengan delapan tangga partisipasi masyarakat dari *Sherry Arnstein* dan dari total semua variabel dapat diketahui tingkat partisipasinya. Jumlah nilai variabel tingkat partisipasi dapat dihitung pada perumusan sebagai berikut:

$$S = N \times B$$

Keterangan:

S = Skor Variabel

N = Jumlah nilai masing-masing sub variabel

B = Bobot

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pembentukan KSM

Tabel 4.1 Hasil Kuesioner Pada Tahapan Pembentukan KSM

| No | Indikator | Bobot (B) | Kriteria | Jumlah Responden (N) | Presentase % | N x B |
|----|----------------------------|------------------|--|----------------------|--------------|-------|
| 1 | Tahapan Perencanaan TPS 3R | 1 | Hadir karena terpaksa | | | |
| | | 2 | Hadir hanya sekedar memenuhi undangan | 70 | 80,46 | 140 |
| | | 3 | memperoleh informasi, tanpa menyampaikan pendapat | 11 | 12,64 | 33 |
| | | 4 | memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, pendapat tidak diperhitungkan | 6 | 6,90 | 32 |
| | | 5 | Hadir dan memberikan pendapat, sedikit diperhitungkan atau dijadikan sebagai keputusan | | | |
| | | 6 | Hadir dan mendapat pembagian tanggung jawab | | | |
| | | 7 | Hadir dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan | | | |
| | | 8 | kekuasaan penuh untuk mengendalikan dan membuat keputusan | | | |
| | | Rata-rata | | | | |

Sumber : Analisis Peneliti 2022

Berdasarkan hasil jawaban responden seperti pada tabel di atas dari 87 responden diketahui bahwa 80,46 % responden hadir hanya sekedar memenuhi undangan, 12,64 % responden hadir untuk memperoleh informasi, tanpa menyampaikan pendapat, sedangkan 6,90 % hadir untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat dan pendapat tidak diperhitungkan. Pada tahapan pembentukan KSM dengan total 87 responden, dapat disimpulkan berdasarkan tangga partisipasi Arnstein, dengan skor rata-rata 68,33. Berdasarkan nilai tersebut masuk kedalam tangga partisipasi yang pertama yaitu Manipulation. Yang dimaksud dengan Manipulation adalah tingkatan partisipasi yang paling rendah, dimana

masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi. Dapat dikatakan tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, karena berdasarkan kuesioner diatas keterlibatan masyarakat hanya dipakai namanya saja dan tidak mengetahui banyak tentang bagaimana perencanaan pembentukan KSM. Karena partisipasi paling tinggi diambil yang sekarang jadi pengelola, sehingga masyarakat tidak berpartisipasi banyak dalam tahapan ini.

4.2. Penetapan Lokasi

Tabel 4.2 Hasil Kuesioner Pada Tahapan Penetapan Lokasi

| No | Indikator | Bobot (B) | Kriteria | Jumlah Responden (N) | Presentase % | N x B |
|------------------|----------------------------|-----------|--|----------------------|--------------|--------------|
| A | Tahapan Perencanaan TPS 3R | | | | | |
| | | 1 | Hadir karena terpaksa | | | |
| | | 2 | Hadir hanya sekedar memenuhi undangan | 70 | 80,46 | 140 |
| | | 3 | Hadir untuk memperoleh informasi, tanpa menyampaikan pendapat | 11 | 12,64 | 33 |
| | | 4 | Hadir untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, pendapat tidak diperhitungkan | 6 | 6,90 | 32 |
| | | 5 | Hadir dan memberikan pendapat, sedikit diperhitungkan atau dijadikan sebagai keputusan | | | |
| | | 6 | Hadir dan mendapat pembagian tanggung jawab | | | |
| | | 7 | Hadir dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan | | | |
| | | 8 | Hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk mengendalikan dan membuat keputusan | | | |
| Rata-rata | | | | | | 68,33 |

Sumber : Analisis Peneliti 2022

Berdasarkan hasil jawaban responden seperti pada tabel di atas dari 87 responden diketahui bahwa 80,46 % responden hadir hanya sekedar memenuhi undangan, 12,64 % responden hadir untuk memperoleh informasi, tanpa menyampaikan pendapat, sedangkan 6,90

% hadir untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat dan pendapat tidak diperhitungkan. Pada tahapan pembentukan KSM dengan total 87 responden, dapat disimpulkan berdasarkan tangga partisipasi Arnstein, dengan skor rata-rata 183,7. Berdasarkan nilai tersebut masuk kedalam tangga partisipasi yang paling rendah yaitu Manipulation. Yang dimaksud dengan Manipulation adalah tingkatan partisipasi yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi. Dapat dikatakan tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, karena berdasarkan kuesioner diatas keterlibatan masyarakat hanya dipakai namanya saja dan tidak mengetahui banyak tentang bagaimana perencanaan pembentukan KSM. Dapat dikatakan tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, karena berdasarkan kuesioner diatas keterlibatan masyarakat hanya sebagai sumber informasi. Karena dalam tahapan ini informasi masyarakat dalam menentukan lokasi menjadi informasi yang sangat penting.

4.3. Pembuatan RAB & RKM

Tabel 4.3 Hasil Kuesioner Pada Tahapan Pembuatan RAB & RKM

| No | Indikator | Bobot (B) | Kriteria | Jumlah Responden (N) | Presentase % | N x B |
|------------------|----------------------------|-----------|--|----------------------|--------------|-------------|
| A | Tahapan Perencanaan TPS 3R | | | | | |
| 3 | Pembuatan RAB & RKM | 1 | Hadir karena terpaksa | | | |
| | | 2 | Hadir hanya sekedar memenuhi undangan | 84 | 96,55 | 168 |
| | | 3 | Hadir untuk memperoleh informasi, tanpa menyampaikan pendapat | | | |
| | | 4 | Hadir untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, pendapat tidak diperhitungkan | | | |
| | | 5 | Hadir dan memberikan pendapat, sedikit diperhitungkan atau dijadikan sebagai keputusan | 3 | 3,45 | 15 |
| | | 6 | Hadir dan mendapat pembagian tanggung jawab | | | |
| | | 7 | Hadir dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan | | | |
| | | 8 | Hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk mengendalikan dan membuat keputusan | | | |
| Rata-rata | | | | | | 91,5 |

Sumber : Analisis Peneliti 2022

Sedangkan pada tahapan pembuatan RAB dan RKM diketahui bahwa 96,55% responden hadir sekedar memenuhi undangan, dan 3,45% hadir dan memberikan pendapat, pendapat tersebut sedikit diperhitungkan dijadikan sebagai keputusan. Pada tahapan pembuatan RAB dan RKM dapat disimpulkan berdasarkan tangga partisipasi Arnstein, dengan skor rata-rata 91,5. Nilai rata-rata diperoleh berdasarkan 3 indikator skor yang sesuai dengan jawaban responden. Berdasarkan nilai tersebut masuk kedalam tangga partisipasi nomor 2 yaitu Therapy. Yang dimaksud dengan Therapy adalah pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri. Dapat dikatakan tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, karena berdasarkan kuesioner diatas masyarakat seolah-olah dilibatkan dalam tahapan ini, karena pada dasarnya penyusunan RAB dan RKM lebih dominan partisipasinya oleh pengelola.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan TPS 3R di Kecamatan Klambu. Tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan berdasarkan 3 indikator didapatkan nilai rata-rata 76,05, berdasarkan nilai tersebut dalam tangga partisipasi Arnstein masuk kedalam tangga partisipasi nomor 1 yaitu Manipulation, dimana tingkatan tersebut merupakan tingkatan paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi. Dapat dikatakan tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, karena berdasarkan kuesioner diatas keterlibatan masyarakat hanya dipakai namanya saja dan tidak mengetahui banyak tentang bagaimana perencanaan TPS 3R. Hanya kegiatan pembuatan RAB & RKM tingkatan masuk kedalam tangga partisipasi nomor 2 yaitu Therapy.

5.2. Saran

Berikut merupakan rekomendasi hasil penelitian bagi pemerintah maupun masyarakat sebagai penerima manfaat dengan adanya TPS 3R :

- Bagi instansi pemerintah maupun stakeholder terkait keterlibatan masyarakat jangan hanya sebagai pemberi informasi, tetapi perlu ada peran lebih dalam pemanfaatan sumber daya masyarakat karena program tersebut juga untuk masyarakat
- Bagi masyarakat supaya berperan lebih aktif dalam perencanaan maupun pembangunan program yang dilakukan pemerintah. Karena ide, gagasan, maupun tenaga dari masyarakat sangat diperlukan, sebab pembangunan tersebut dibuat dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan juga terdapat beberapa rekomendasi penelitian lanjutan, antara lain sebagai berikut:

- perlu adanya penelitian mengenai aturan keterlibatan masyarakat dalam program-program pemerintah seperti perencanaan dan pembangunan TPS 3R
- Mengkaji kebijakan pemerintah dalam melaksanakan suatu program yang harus melibatkan masyarakat

- Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat sebelum melaksanakan program yang dilakukan pemerintah, karena program tersebut dilaksanakan atau dibangun juga untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A., Fatimah, E., & Suhendrayatna, S. (2019). Tingkat Kepentingan Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis 3r Di Provinsi Aceh. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan*, 2(1), 38-47.
- Alwi, A., Nonci, N., & Erfina, E. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(1), 1-6.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.
- Artiningsih, N. K. A. (2008). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang) (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Harjanti, I. M., & Anggraini, P. (2020). Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (tpa) jatibarang, kota semarang. *Jurnal Planologi*, 17(2), 185-197.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: CV. Tamita Utama.
- Jayantri, A. S., & Ridlo, M. A. (2022). Strategi Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pantai. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 147-159.
- Permen PU No. 3 Tahun 2013, tentang syarat pembangunan TPS 3R
- Syahputra, E. N. (2021). Perencanaan tempat pengolahan sampah 3R (TPS 3R) Kelurahan Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Widyawan, I. M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Tempat Pengolahan Sampah 3r Di Desa Haurkuning Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- WIWIN, D. A. H. P. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).